



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 8 April 2021.
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Penyesuaian Penggunaan (Refocussing) Program Anggaran Tahun 2021 2. Isu-Isu Aktual Lainnya.
Ketua Rapat	: H. Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 17 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 12 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt , dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. , dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, yang membahas “Penyesuaian Penggunaan (*Refocusing*) Kebijakan APBN Tahun 2021 dan Isu-isu Aktual beserta Alternatif Solusinya”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami *refocusing* anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2021 sebesar Rp483.541.964.000,- (*empat ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*). Jadi, anggaran Kementerian Agama RI yang semula sebesar Rp66.961.386.822.000,- (*enam puluh enam triliun sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp66.766.561.128.000,- (*enam puluh enam triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*). Rinciannya sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	APBN 2021 (Rp000)	
		Sebelum	Menjadi
1	Sekretaris Jenderal	2.280.046.995	2.225.932.788
2	Inspektorat Jenderal	170.124.955	159.767.627
3	Ditjen Bimas Islam	5.757.112.044	5.666.222.204
4	Ditjen Pendidikan Islam	52.523.995.366	52.689.597.988
5	Ditjen Bimas Kristen	1.870.028.494	1.842.919.184
6	Ditjen Bimas Katolik	899.724.298	886.800.288
7	Ditjen Bimas Hindu	803.751.045	781.500.789
8	Ditjen Bimas Buddha	272.661.176	260.650.400
9	Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah	1.593.301.172	1.540.974.214
10	Badan Litbang dan Diklat Keagamaan	693.143.361	627.965.807
11	BPJPH	97.497.916	84.229.839
	Total Anggaran	66.961.386.822	66.766.561.128

2. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
 - a. Perekrutan guru agama dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) harus dilaksanakan secara transparan, bertanggungjawab, dan memperhatikan proporsionalitas.

- b. Mengupayakan anggaran untuk bantuan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, serta pendidikan keagamaan non Islam melalui peningkatan koordinasi dan lobi kepada Kementerian Keuangan RI.
 - c. Memastikan bahwa kelengkapan jemaah haji yang berbentuk souvenir dan koper jemaah haji berkualitas baik dan tahan lama.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk mempercepat Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Layanan Sertifikasi Halal oleh BPJPH.
 - e. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program kerukunan umat beragama.
 - f. Memperkuat pendidikan karakter dan kebangsaan di lembaga pendidikan keagamaan, madrasah dan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Agama RI tahun 2021 sebesar Rp1.332.645.447.000,- (*satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) yang akan digunakan untuk memberikan kuota internet selama 3 (tiga) bulan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI.
 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk lebih intensif melakukan lobi kepada Pemerintah Saudi Arabia untuk mempercepat kepastian kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.
 5. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan dan penetapan BPIH tahun 1442 H/2021 M pada waktu reses DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2020-2021. Apabila Pemerintah Indonesia tidak dapat memberangkatkan jemaah haji, maka harus diputuskan secara bersama-sama dengan Komisi VIII DPR RI.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

KETUA KOMISI VIII DPR RI,



H. YANDRI SUSANTO, S.Pt